

**ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL, INDEKS PEMBANGUNAN  
MANUSIA, DAN TENAGA KERJA TERSERAP TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

Wawan Aryanto<sup>1</sup> Riya Dwi Handaka<sup>2</sup>

[handaka@pknstan.ac.id](mailto:handaka@pknstan.ac.id)

**Abstrak**

*There are many ways for a region to raise its economic growth. On this research aims to examine the effect of Human Development Index, capital expenditures, and labor absorption on economic growth of local governments in Indonesia. We use secondary data. There are variable the Human Development Index, capital expenditures of local governments, and labor absorption as an exogenous variable, while Gross Regional Domestic Product as an endogenous variable. This study uses panel data which combines time series data and cross section. These data were analyzed using regression with Eviews program. The results with significance level  $\alpha = 0.05$  showed that all hypothesis are accepted. All of exogenous variables are proved significantly positive effect on economic growth.*

**Keywords:** *Capital expenditures of local governments, labor absorption, Human Development Index, and Gross Regional Domestic Product.*

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan hal penting dalam menggerakkan perekonomian suatu bangsa. Di antara tujuan utama pembangunan adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran yang besar dalam bentuk kebijakan fiskal melalui APBN/APBD.

Pemerintahan Jokowi-JK telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi, yang diantara isinya adalah kebijakan peningkatan infrastruktur, program satu juta rumah untuk penduduk miskin, wajibnya pekerja memiliki jaminan kesehatan (BPJS), dan memperluas lapangan kerja serta kemudahan berusaha. Dari paket kebijakan ekonomi tersebut, peneliti melihat terdapat kebijakan yang berdampak terhadap peningkatan belanja modal, belanja pendidikan, dan belanja kesehatan. Selain paket kebijakan ekonomi, pemerintah Jokowi-JK juga melakukan kebijakan nawacita, sesuai dengan janji kampanyenya. Dalam nawacita 5, pemerintah ingin meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui “Indonesia Pintar”, “Indonesia Sehat”, “Indonesia Kerja”, dan “Indonesia Sejahtera”. Selain itu, dalam nawacita 3, pemerintah melakukan kebijakan pembangunan ekonomi dari pinggiran.

Dari kebijakan pemerintah tersebut, terjadi peningkatan belanja infrastruktur, belanja pendidikan, dan belanja kesehatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data BKF, rata-rata belanja infrastruktur pemerintah tahun 2011-2014 dibandingkan dengan tahun 2015-2017 mengalami peningkatan 123,4%. Sedangkan rata-rata belanja pendidikan dan kesehatan tahun 2015-2017 mengalami peningkatan sebesar 27,4% dan 83,2% disbanding rata-rata tahun 2011-2014. Penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan, berdasarkan data BPS, tercatat sebanyak 108,21 juta penduduk yang bekerja sedangkan tahun 2015 naik menjadi 114,82 juta penduduk.

Adanya peningkatan belanja infrastruktur berarti terjadi peningkatan belanja modal pemerintah. Secara langsung, belanja pemerintah akan meningkatkan Produk Domestik Bruto yang berarti bahwa belanja pemerintah merupakan pendorong ekonomi untuk tetap tumbuh.

Selain itu, terapat *multiplier effect* dari belanja modal yang dilakukan pemerintah yakni berupa menciptakan lapangan pekerjaan akan mengurangi pengangguran, penduduk yang memiliki penghasilan akan membelanjakan uangnya sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Belanja modal pada infransruktur (misalnya jalan raya), akan meningkatkan kemudahan masyarakat dalam menjalankan usaha dan memperlancar arus barang, sehingga dapat memicu peningkatan produktifitas pengguna jalan raya, dengan produktifitas yang meningkat akan memicu pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan BAPPENAS (2006), (Nurmainah, 2013), (Eka Parmawati, 2008) dan (Aschauer, 1989) menyimpulkan bahwa belanja modal pemerintah secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Belanja modal yang dilakukan pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga dapat mengurangi pengangguran, berkurangnya pengangguran berarti pula berkurangnya penduduk yang tidak berpenghasilan, sedangkan penduduk yang tidak produktif (menganggur) merupakan salah satu sebab kemiskinan itu sendiri. Belanja modal pada sektor tertentu akan menyebabkan peningkatan produktifitas pada sektor itu juga, misalnya belanja modal pada sektor pertanian akan menyebabkan peningkatan produktifitas petani secara umum, yang berarti akan meningkatkan penghasilan petani, dengan peningkatan penghasilan tersebut akan berpengaruh langsung pada pengurangan kemiskinan di sektor pertanian. Penelitian (Fan, Hazell, & Thorat, 2000) di Negara India menyimpulkan bahwa belanja pemerintah dalam investasi yang produktif seperti belanja penelitian, belanja irigasi pertanian, dan infrastruktur, berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan penduduk di India.

Penyerapan tenaga kerja yang terjadi di Indonesia berdampak kepada peningkatan produktifitas nasional (peningkatan *output*), yang berarti akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. (Nurmainah, 2013) dan (Amir, Khan, & Bilal, 2015) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa tenaga kerja terserap berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan belanja pendidikan dan belanja kesehatan secara langsung mendukung peningkatan IPM karena IPM terdiri dari tiga komponen utama, yakni angka melek huruf (pendidikan), kesehatan, dan pengeluaran penduduk. IPM yang meningkat menandakan adanya peningkatan pendidikan serta kesehatan penduduk, dengan pendidikan dan kesehatan yang baik akan memicu peningkatan produktifitas penduduk secara umum. Peningkatan produktifitas ini akan menyebabkan perekonomian tumbuh. Selain itu, peningkatan produktifitas penduduk biasanya akan diikuti dengan peningkatan penghasilan. Penduduk yang berpenghasilan tinggi akan memiliki kebiasaan belanja yang besar juga, sehingga akan menyebabkan adanya pertumbuhan ekonomi. Penelitian Nurmainah (2014) dan (Muhammad Afzal, A. et al, 2009) menyimpulkan bahwa IPM berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan dan beberapa rujukan penelitian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah di Indonesia. Dengan mengambil sampel seluruh kabupaten/kota di Indonesia, diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa dengan adanya desentralisasi, peran pemerintah kabupaten/kota melalui kebijakan fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu peneliti melakukan replikasi penelitian sebelumnya dengan memberikan sentuhan yang berbeda pada objek penelitian yang diperluas menjadi seluruh kabupaten/kota diseluruh Indonesia dan tidak regional sebagaimana penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengambil faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang didefinisikan dalam variabel-variabel bebas berupa; yang pertama adalah belanja modal pemerintah daerah pada APBD, kedua Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), yang biasanya merupakan output atau arah dari belanja atau tujuan dari kebijakan anggaran, dan ketiga adalah tenaga kerja terserap, dimana biasanya variabel ini merupakan arah dari kebijakan anggaran. Adapun variabel terikat adalah pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh PDRB (pendapatan domestik regional bruto).

## 2. Maksud dan Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: a) menganalisis pengaruh IPM terhadap PDRB kabupaten/kota; b) menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja terserap terhadap PDRB kabupaten/kota; c) menganalisis pengaruh belanja modal pemerintah terhadap PDRB kabupaten/kota; d) menganalisis pengaruh IPM, jumlah tenaga kerja terserap, dan belanja modal secara simultan terhadap PDRB kabupaten/kota.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi positif dalam sisi pengetahuan, penelitian, dan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: a) kontribusi kebijakan, memberikan masukan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dari APBN, APBD, UU, PP serta Perda yang menyertainya; b) kontribusi empiris, untuk memperkuat penelitian sebelumnya, berkenaan dengan pengaruh besarnya IPM, jumlah tenaga kerja terserap, dan belanja modal terhadap PDRB yang dilakukan secara empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia; dan c) kontribusi teori, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

## 3. Ruang Lingkup

Penelitian ini menggunakan seluruh kabupaten/kota di Indonesia sebagai objek observasi, dengan periode data penelitian tahun 2011 s.d. 2015. Adapun pemerintah kabupaten/kota yang keberadaannya tidak melingkupi waktu tersebut, akan dikecualikan dari penelitian ini. Selain itu, variabel penelitian ini terbatas pada data yang tersedia dari DJPK, BPS, dan BPK serta *website* BPS Provinsi atau *website* BPS Kabupaten/kota. Adapun variabel yang digunakan adalah: a) PDRB kabupaten/kota; b) belanja modal pemerintah kabupaten/kota; c) IPM kabupaten/kota; dan d) penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota.

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Sejak tahun 1950-an telah berkembang teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik. Menurut Todaro dalam (Nurmainah, 2013), model pertumbuhan Neo Klasik Solow ini merupakan pengembangan dari formulasi Harrod Domar dengan menambahkan faktor kedua yakni tenaga kerja serta memperkenalkan variabel independen ketiga yakni teknologi ke dalam persamaan pertumbuhan ekonomi. Todaro juga menyampaikan ada tiga komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. *Pertama*, akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal manusia atau sumberdaya manusia. *Kedua*, pertumbuhan penduduk yang selanjutnya akan menambah jumlah angkatan kerja. *Ketiga*, kemajuan teknologi yaitu berupa cara-cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani suatu pekerjaan.

Dalam Teori Pertumbuhan Baru (*new growth theory*) yang disebutkan pada (Cortright, 2001),

pertumbuhan ekonomi ditekankan pada adanya peningkatan pengembalian karena adanya pengetahuan baru. Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya investasi dalam penciptaan pengetahuan baru (penelitian) untuk mempertahankan pertumbuhan. Pemerintah selaku pembuat kebijakan akan membutuhkan perhatian yang lebih besar kepada faktor yang menyediakan insentif untuk penciptaan pengetahuan (riset dan pembangunan, sistem pendidikan, kewirausahaan dan toleransi keberagaman, ekspektasi makroekonomi, keterbukaan terhadap perdagangan).

## 2. Teori Belanja Pemerintah

Keynes dalam (Sukirno, 2000) menyebutkan, peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan. Apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak akan mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan.

Mankiw dalam (Nurmainah, 2013) menyebutkan bahwa tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh pengeluaran agregat. Jika pengeluaran pemerintah meningkat maka permintaan agregat akan meningkat. Selain itu, peranan pengeluaran pemerintah di negara berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas. Jadi, belanja pemerintah yang meningkat akan berdampak pada peningkatan Produk Domestik bruto (PDB) atau bisa juga disebut sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi.

Adapun belanja pemerintah disini diwakili dengan belanja modal. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 53 belanja modal merupakan jenis belanja langsung pada APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gudang dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan asset tetap lainnya. Keberadaan anggaran belanja modal yang bersumber dari bantuan pusat dan pendapatan asli daerah mempunyai strategis, karena sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan dibidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha dan pemenuhan pelayanan masyarakat.

Terdapat beberapa model belanja modal pemerintah menurut Rostow dan Musgrave dalam (Wicaksono, 2014) yaitu:

- a. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi adalah besar, karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti: pendidikan, kesehatan, transportasi.
- b. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar.
- c. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut dalam pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti: program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

## 3. Teori Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sejak tahun 1998, BPS menggunakan

Lewis dalam (Nurmainah, 2013) menjelaskan bahwa perekonomian dibagi menjadi dua sektor yaitu: (a) sektor tradisional (pedesaan yang subsisten) yang ditandai oleh produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah bahkan nol; (b) sektor modern (industri perkotaan) dimana tenaga kerja dari sektor subsisten berpindah secara perlahan. Tingkat akumulasi modal industri (investasi) yang dilakukan di sektor modern, maka akan menarik tenaga kerja dari sektor tradisional, sehingga penyerapan tenaga kerja tersebut akan menambah produk yang dikeluarkan yang pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi (peningkatan produk domestik bruto). Todaro dalam (Nurmainah, 2013) mengemukakan, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar berarti akan menambah jumlah tenaga yang produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran domestiknya lebih besar.

#### 4. Indeks Pembangunan Manusia

*United Nations Development Programme* (UNDP) dalam (Harmawanti Marhaeni, Sri Yati, 2007) menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Menurut Ramires dalam (Wicaksono, 2014) tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Adapun menurut Mankiw dalam (Nurmainah, 2013), modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui pendidikan mulai dari program untuk anak-anak sampai dengan pelatihan dalam pekerjaan (*on the job training*) untuk para pekerja dewasa. Seperti halnya dengan modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Untuk meningkatkan level modal manusia dibutuhkan investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana data yang dianalisis merupakan data sekunder berupa data panel dengan waktu penelitian dari tahun 2011 s.d. 2015. Sumber data didapat oleh penulis dari Badan Pusat Statistik, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Peneliti menggunakan regresi linear sebagai teknis analisisnya.

Definisi variabel dalam penelitian ini dijelaskan dibawah ini.

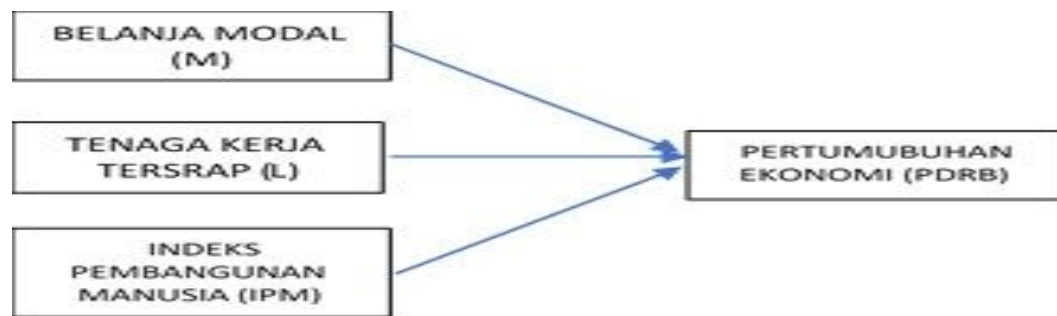
- a. Pertumbuhan Ekonomi, dalam hal ini merupakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah (kabupaten/kota) dalam jangka satu tahun (menurut kelompok jasa).
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah angka yang menunjukkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup

sehat, tingkat pengetahuan, dan standar hidup layak.

- c. Jumlah tenaga kerja terserap (L) adalah jumlah angkatan kerja kabupaten/kota yang benar-benar bekerja pada tahun penelitian. Jumlah tenaga kerja terserap merupakan jumlah penduduk yang bekerja di suatu kabupaten/kota berdasarkan publikasi BPS.
- d. Belanja modal (M) adalah jumlah belanja modal pemerintah kabupaten/kota berdasarkan realisasinya.

Model penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Model Penelitian



Persamaan dari model yang dibentuk adalah

$$PDRB = a + a_1 M + a_2 L + a_3 IPM + \epsilon$$

Keterangan:

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto  
kabupaten/kota

M : belanja modal pemerintah  
kabupaten/kota

L : tenaga kerja terserap pada  
kabupaten/ kota

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

$a$  : konstanta regresi

$\epsilon$  : *error term*

Pengujian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, uji pemilihan model, dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik diperlukan agar hasil regresi yang dilakukan bebas dari adanya gejala heteroskedasitas, gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi.

Menurut (Widarjono, 2013) terdapat tiga model yang digunakan dalam regresi data panel yaitu *Common Effect Model*, Model Efek Tetap (*Fixed Effect Model*) dan Model Efek Random (*Random Effect Model*). Untuk menentukan model estimasi data panel terbaik, peneliti akan melakukan uji *Chow (Likelihood Ratio Test)*, Uji Hausman dan *Lagrange multiplier Test*.

Untuk membuktikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, peneliti akan melakukan uji F, uji t, dan uji  $R^2$ . Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji t digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara parsial. Sementara uji  $R^2$  dipakai untuk menjelaskan seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data dalam variabel regresi terdapat residual yang terdistribusi normal. Dalam penelitian ini, kabupaten/kota yang masuk dalam objek penelitian berjumlah 413. Dengan jumlah variabel 4 dan waktu lima tahun, didapatkan jumlah observasi sebanyak 2.065 observasi. Menurut Gujarati (2012), analisis data panel dengan objek melebihi 100 observasi dapat dikatakan telah memenuhi normalitas data, sehingga tidak memerlukan uji normalitas dikarenakan distribusi *error term* telah mendekati normal.

Uji multikolinearitas merupakan pengujian untuk menunjukkan adanya hubungan linear antara variabel bebasnya. (Ghozali, 2006) menjelaskan bahwa jika di antara variabel bebasnya terdapat korelasi yang cukup tinggi (di atas 0.95), maka hal tersebut merupakan indikasi adanya masalah multikolinearitas. Sementara Widarjono (2013)

menjelaskan bahwa koefisien korelasi antar variabel bebasnya lebih dari 0,85, maka diduga telah ada masalah multikolinearitas dalam model.

Uji autokorelasi merupakan pengujian untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  atau periode sebelumnya. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*, dengan hipotesis jika ( $p\text{-value} < \alpha$ ) maka terdapat masalah autokorelasi sedangkan jika ( $p\text{-value} > \alpha$ ) tidak ada masalah autokorelasi, dengan  $\alpha$  5%.

Uji heterokedastisitas merupakan pengujian untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terdapat varian yang tidak konstan. Terdapat banyak metode yang dapat digunakan untuk melakukan uji heterokedastisitas ini, baik dengan metode grafik maupun dengan metode formal seperti Uji Glejser, Uji Breusch-Pagan/Godfrey, Uji White, Uji ARCH, atau Uji Harvey. Hipotesis dari pengujian formal ini adalah jika ( $p\text{-value} < \alpha$ ), maka terdapat masalah heteroskedastisitas, sementara jika ( $p\text{-value} > \alpha$ ), maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Adapun hasil uji asumsi klasik dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik**

Pengujian	Persamaan I
Multikolinearitas	tidak ada masalah
Autokorelasi	ada masalah
Heterosketastisitas	ada masalah

Sumber: data diolah.

(Nachrowi, 2006) menjelaskan bahwa dalam model *fixed effect*, sulit dipenuhi asumsi terbebasnya model dari masalah autokorelasi, sehingga uji tentang autokorelasi dapat diabaikan. (Widarjono, 2013) menjelaskan bahwa penyembuhan autokorelasi dapat dilakukan dengan transformasi persamaan yang dikenal sebagai metode *generalized difference equation*. Pada dasarnya metode penyembuhan ini dilakukan dengan mengubah pendekatan regresi yang sebelumnya menggunakan *ordinary least squared* (OLS) menjadi *generalized least square* (GLS). Penyembuhan dengan cara ini dapat langsung dilakukan pada aplikasi *Eviews 9* saat meregresi data.

Masalah heteroskedastisitas seperti ini bisa terjadi secara alami pada variabel-variabel ekonomi. Dalam kasus penelitian ini, peneliti menemukan adanya kabupaten/kota dengan PDRB yang sangat berbeda, padahal kabupaten/kota tersebut memiliki belanja modal, jumlah tenaga

kerja terserap, atau IPM yang hampir sama. Masalah ini dapat diatasi dengan *views* 9, yakni dengan metode *white period* saat melakukan regresi.

## 2. Uji Pemilihan Model

*Likelihood Ratio Test* atau *Chow test* merupakan metode yang digunakan untuk menentukan pemilihan model regresi yang lebih baik antara model FEM atau model PLS. Peneliti menggunakan  $\alpha$  sebesar 5%, dengan hipotesis jika  $\rho\text{-value} < \alpha$ , maka model regresi dengan pendekatan FEM lebih sesuai. Sementara jika  $\rho\text{-value} > \alpha$ , maka model regresi dengan pendekatan PLS lebih sesuai untuk digunakan.

*Hausman Test* merupakan metode pengujian yang digunakan untuk memilih model regresi yang lebih baik antara pendekatan REM atau pendekatan FEM. Peneliti menggunakan  $\alpha$  sebesar 5%, dengan hipotesis jika  $\rho\text{-value} < \alpha$ , maka model regresi dengan pendekatan FEM lebih sesuai. Sementara jika  $\rho\text{-value} > \alpha$ , maka model regresi dengan pendekatan REM lebih sesuai untuk digunakan.

*Lagrange Multiplier Test* merupakan metode pengujian untuk memilih regresi yang tepat antara REM dan PLS. Hipotesisnya adalah jika *Both value* pada Breusch-Pagan signifikan terhadap  $\alpha$  5% maka memilih model REM sebagai pendekatan regresi, sedangkan jika nilainya lebih dari 5%, maka memilih model PLS sebagai pendekatan regresinya.

**Tabel 2. Hasil Uji Pemilihan Model**

Metode pengujian	Model regresi yang sesuai
	Persamaan
<i>Likelihood Ratio Test (Chow Test)</i>	<i>Prob. Cross Section Chi-Square = 0,00</i> (model FEM)
<i>Hausman Test</i>	<i>Prob. Cross-section Random = 0,00</i> (model FEM)
<i>Lagrange Multiplier Test (LM)</i>	<i>Breusch-Pagan Value (both) = 0,00</i> REM

Sumber: hasil olah data

Uji *chow* dan uji *hausman* diperoleh hasil bahwa pendekatan FEM lebih sesuai untuk model regresi dari persamaan yang dibentuk. Sedangkan uji LM diperoleh hasil bahwa pendekatan REM lebih sesuai untuk model regresi persamaan yang dibentuk. Dari ketiga pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengujian dengan pendekatan FEM lebih sesuai untuk kedua model persamaan regresi (Lihat Tabel 2).

## 3. Uji Hipotesis

Pengujian regresi terdiri dari uji t, uji  $R^2$ , dan uji F. Setelah dilakukan regresi dengan pendekatan FEM, diperoleh hasil sebagaimana Tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3. Hasil Regresi dengan Pendekatan *Fix Effect (Cross Section Weight & White Period)***

Variabel	Model (PDRB)		Keterangan
	Coefficient	Prob. Value	
1			



IPM	1194,865	0,0000	Signifikan ( $\alpha$ 5%)
L	0,032551	0,0000	Signifikan ( $\alpha$ 5%)
M	$9,57 \times 10^{-6}$	0,0000	Signifikan ( $\alpha$ 5%)
C	-71.836,02	0,0000	Signifikan ( $\alpha$ 5%)
<i>Adj. R<sup>2</sup></i>	98,09%		<i>Model fit</i>
<i>F-stat</i>	0,0000		-

Sumber: hasil olah data

#### a. Uji t

Uji t merupakan pengujian dengan tujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan  $\rho$  value masing-masing variabel independen dengan  $\alpha$  5%. Jika  $\rho$  value kurang dari 5%, maka diambil kesimpulan bahwa variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependennya, sementara jika  $\rho$  value lebih dari 5%, maka kesimpulannya sebaliknya, yakni variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

Dari model persamaan yang dibentuk, dimana PDRB sebagai variabel terikat, diperoleh kesimpulan bahwa semua variabel independen (IPM, tenaga kerja terserap, dan belanja modal pemerintah) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

#### b. Uji R<sup>2</sup>

Uji koefisien determinasi merupakan pengujian untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen (Widarjono, 2013). Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ). Semakin besar nilai R<sup>2</sup> menandakan bahwa variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang yang dibutuhkan dalam menjelaskan perubahan variabel dependen.

Dari model persamaan yang dibentuk, diperoleh nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 98,09%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen (IPM, belanja modal pemda, dan tenaga kerja terserap) dalam model dapat menjelaskan sebanyak 98,09% terhadap variasi variabel dependen (PDRB). Sementara sebanyak 1,91% variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak dijelaskan dalam model persamaan.

#### c. Uji F

Uji F merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model dapat secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara Probabilitas F-stat dengan tingkat kesalahan toleransi yang dipakai ( $\alpha$  5%). Hipotesis yang dipakai adalah jika Probabilitas F-stat kurang dari  $\alpha$  (5%), maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika Probabilitas F-stat lebih dari  $\alpha$  (5%), maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil regresi persamaan I diperoleh nilai Probabilitas F-stat sebesar 0,000000. Nilai tersebut signifikan terhadap  $\alpha$  ( $\rho$  value  $<$  5%), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen (IPM, belanja modal pemda, dan tenaga kerja terserap) secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen (PDRB).

## E. PENUTUP

### 1. Simpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan yang dihubungkan dengan landasan teori dan latar belakang diatas, dengan menggunakan periode tahun 2011 s.d. 2015, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Indonesia;
- b. Jumlah tenaga kerja terserap kabupaten/kota berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Indonesia;
- c. Belanja modal pemerintah kabupaten/kota berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Indonesia;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah tenaga kerja terserap, dan belanja modal kabupaten/kota secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Indonesia.

### 2. Implikasi dan Saran

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya, meskipun penelitian sebelumnya dilakukan hanya dengan mengambil sample sedikit/regional seperti yang dilakukan (Nurmainah, 2013). Penelitian ini membuktikan bahwa secara nasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah tenaga kerja terserap, dan belanja modal kabupaten/kota baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Indonesia.

Untuk itu dari implikasi tersebut guna menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi diharapkan *fiscal and budget policy* pemerintah daerah dapat mempertimbangkan hal berikut:

- a. Dikarenakan IPM merupakan variabel yang pengaruhnya paling besar terhadap PDRB maupun kemiskinan, perlu ada program serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkat IPM penduduknya. Diantara program yang dapat meningkatkan IPM, menurut adalah dengan meningkatkan belanja kesehatan, belanja pendidikan, dan belanja pekerjaan umum.
- b. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementeria Dalam Negeri dapat menerapkan kebijakan belanja modal pada APBD melalui skema dana transfer ke daerah dan Kebijakan Penyusunan APBD. Kebijakan penganggaran transfer dapat diarahkan kepada belanja modal khususnya untuk daerah-daerah yang infrastrukturnya masih belum memadai serta daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi (di atas rata-rata).
- c. Pemerintah juga dapat memperluas program wajib belajar sembilan tahun tidak hanya untuk penduduk usia sekolah, tetapi juga untuk penduduk usia kerja, karena berdasarkan RPJM Kemenaker 2015-2019, sebanyak 47,07% tenaga kerja di Indonesia hanyalah lulusan SD ke bawah. Selain itu, pemerintah daerah dapat membatu tercapainya program pemerintah pusat yang tertuang dalam RPJM Kemendikbud 2015-2019, yakni tersedianya SMA/K di setiap kecamatan di Indonesia.
- d. Pemerintah perlu melanjutkan kebijakan peningkatan belanja modal, terutama diarahkan untuk sektor pertanian dan perdagangan, dikarenakan kedua sektor tersebut menampung sekitar 55,66% jumlah tenaga kerja di Indonesia. Adapun prioritas belanja modalnya untuk kedua sektor tersebut, misalnya belanja modal irigasi, pembukaan lahan baru, teknologi pertanian, *Research and Development* pada pertanian, serta belanja modal untuk infrastruktur

jalan dan transportasi. Sesuai hasil penelitian Fan *et. al.* (2000) yang menyebutkan bahwa belanja pemerintah dalam sektor produktif akan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Sumber lainnya

- Amir, H., Khan, M., & Bilal, K. (2015). Impact of educated labor force on Economic growth of Pakistan : A human capital perspective. *European Online Journal of Natural and Social Sciences*, 4(4), 814–831.
- Aschauer, D. A. (1989). Is Public Expenditure Productive? *Journal Of Monetary Economics*, 23(March 1988), 177–200.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2011-2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. *Indeks Pembangunan Manusia 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2014-2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2014-2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. *Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2012-2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2010-2011*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Cortright, J. (2001). New Growth Theory , Technology and Learning : A Practitioner ' s Guide New Growth Theory , Technology and Learning A Practitioners Guide. *Reviews of Economic Development Literature and Practice*, (4).
- Eka Parmawati, A. S. (2008). Kausalitas Penerimaan , Belanja Dan PDRB Kabupaten/Kota Di Indonesia (Studi Kasus Periode 2001- 2008). *Universitas Diponegoro*, 1–28. Retrieved from [eprints.undip.ac.id/26467/1/Jurnal\\_Skripsi.pdf](http://eprints.undip.ac.id/26467/1/Jurnal_Skripsi.pdf)
- Fan, S., Hazell, P., & Thorat, S. (2000). Government Spending , Growth and Poverty in Rural India. *American Journal of Agricultural*, 82(November), 1038–1051. Retrieved from <https://academic.oup.com/ajae/article-abstract/82/4/1038/96675>
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Harmawanti Marhaeni, Sri Yati, B. T. M. (2007). *Indeks Pembangunan Manusia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Muhammad Afzal, A. Rauf Butt, Hafeez Ur Rehman, and I. B. (2009). A Dynamic Analysis of the Relationship among Human Development , Exports and Economic Growth in Pakistan. *The Pakistan Development Review* 48, 48(Winter), 885–920.
- Nachrowi, Djalal dan Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Nurmainah, S. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 20(2), 131–141.

Sukirno, Sadono (2000). *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Keynesian Baru* (Pertama). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wicaksono, M. N. (2014). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, angkatan kerja, dan belanja modal daerah terhadap peningkatan pdrb provinsi di indonesia tahun 2008-2012, (UB).

Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (Keempat). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bappenas. 2006. *Penyusunan Model Perencanaan Lintas Wilayah dan Lintas Sektor Tahun 2006*

[Online]. <http://www.bappenas.go.id/data-dan-informasiutama/1862-laporan-hasil-kajian-tahun-2006-penyusunan-model-perencanaanlintas=-wilayah-dan-lintas-sektor-/> [10 April 2017].